

Nomor : B/ 713 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

di

Jakarta

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pusat maupun unit kerja.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan dokumen kinerja, khususnya penetapan sasaran dan indikator pada Perjanjian Kinerja (PK);
- b. Melakukan pembangunan aplikasi APII-KINERJA BPIP untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
- c. Melaksanakan evaluasi Internal AKIP, yang menghasilkan nilai AKIP untuk setiap unit kerja.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menunjukkan bahwa nilai sebesar **61,20** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"baik"**, yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada Instansi Pemerintah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,80
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,90
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,90
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hasil evaluasi tahun 2022 **"tidak diperbandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level lembaga maupun level unit kerja.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah memperbaiki sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan pada meningkatnya komitmen pemimpin lembaga bersama dengan para pimpinan unit kerja dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan melakukan penyusunan penjenjangan kinerja sebagai dasar perbaikan sasaran strategis dan indikator pada dokumen perencanaan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman perencanaan yang komprehensif sebagai panduan dalam penyusunan perencanaan;
- Penjenjangan kinerja yang disusun belum berdasarkan identifikasi *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja, sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- Masih terdapat sasaran yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART pada Perjanjian Kinerja (PK) lembaga dan unit kerja Tahun 2022, diantaranya sebagai berikut:
 - Sasaran pada PK Kepala Badan berupa *terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dalam penyelenggaraan negara pada K/L/P dengan indikator persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP;*
 - Sasaran pada PK Kepala Badan berupa *terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan massif secara nasional dengan indikator rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden;*
 - Sasaran pada PK Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi berupa *terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP dengan indikator:*
 - *Persentase dokumen pengendalian kebijakan strategis dan program teknis pembinaan ideologi Pancasila yang termanfaatkan;*
 - *Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan strategis dan program teknis pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;*
 - *Persentase sistem pengendalian dan evaluasi terpusat berbasis elektronik dan termanfaatkan.*
 - Sasaran pada PK Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan berupa *terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga Pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga Pendidikan/ keagamaan nonformal dan informasi dengan indikator:*

- *Persentase hasil perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;*
- *Persentase pemanfaatan standarisasi dan kurikulum Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;*
- *Persentase peserta Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya;*
- *Persentase tenaga pengajar Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang tersertifikasi (ToT)*
- *Sarana Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.*
- Belum seluruh unit kerja menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mendukung pencapaian target PK 2022.

2) Pengukuran Kinerja

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan telah memiliki rencana aksinya untuk pencapaian kinerja. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman formulasi perhitungan yang tertera pada Indikator Kinerja Utama (IKU) di level lembaga dan unit kerja. Selain itu, telah dibangun aplikasi E-SAKIP untuk mendukung evaluasi kinerja organisasi. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum terdapat pedoman mengenai pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja;
- Aplikasi APII-KINERJA BPIP belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari pengukuran capaian kinerja yang belum seluruhnya terisi dan terdapat kesalahan dalam pengisian data capaian;
- Pengukuran kinerja organisasi belum diikuti dengan proses pembaruan target dan strategi dalam upaya memastikan pencapaian kinerja maksimal di akhir periode;
- Terdapat penetapan target pada PK level Kepala Badan maupun unit kerja tahun 2022 yang berada di bawah capaian tahun 2021. Hal ini bisa dilihat pada beberapa contoh di bawah ini:
 - Target nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) 2022 sebesar 71 sedangkan capaian 2021 sebesar 76,78 (Kepala Badan);
 - Target persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusional PIP 2022 sebesar 60% sedangkan capaian

2021 sebesar 133% (Kepala Badan);

- Target Indeks Sistem Merit 2022 sebesar 0,7 sedangkan capaian 2021 sebesar 253,5 (Sekretaris Utama).

3) **Pelaporan Kinerja**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat lembaga maupun tingkat unit kerja. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Unit Eselon II memiliki PK masing-masing, akan tetapi laporan kinerja nya masih digabung dengan laporan kinerja unit Eselon I;
- Laporan kinerja unit kerja belum memuat pernyataan telah di-reviu yang dikeluarkan oleh Biro Pengawasan Internal;
- Laporan kinerja unit belum seluruhnya dipublikasikan, sehingga belum bisa diakses oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk akuntabilitas publik;
- Laporan kinerja lembaga dan unit kerja belum sepenuhnya memberikan analisis yang memadai atas faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja, perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, serta strategi perbaikan untuk tahun selanjutnya.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP unit kerja. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk perbaikan AKIP unit kerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

- Belum terdapat pedoman evaluasi SAKIP yang minimal memuat mengenai mekanisme evaluasi dan klasifikasi sumberdaya manusia dibutuhkan, sehingga evaluasi internal belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan belum didukung dengan *Quality Assurance* yang memadai;
- Laporan hasil evaluasi internal belum menggambarkan kondisi nyata masing-masing unit kerja, dan belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap unit kerja;



4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyusun pedoman SAKIP dengan memastikan minimal aspek perencanaan, pengumpulan dan pengukuran data kinerja, serta evaluasi internal sudah tersusun secara komprehensif;
- 2) Memastikan seluruh perjenjangan kinerja yang telah disusun sesuai dengan PermenPANRB No.89 Tahun 2021 sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas dan keselarasan tujuan, sasaran strategis, dan indikator di setiap level organisasi;
- 3) Memastikan pemanfaatan penjenjangan kinerja termamfaatkan sebagai dasar melakukan perbaikan sasaran dan indikator pada seluruh dokumen perencanaan di setiap level organisasi;
- 4) Memastikan bahwa penetapan target kinerja memperhitungkan capaian periode sebelumnya untuk memastikan kualitas target yang ditetapkan dan kesesuaian dengan formulasi indikator;
- 5) Meningkatkan pemanfaatan Aplikasi APII-KINERJA BPIP sebagai salah satu alat bantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja serta memastikan kelengkapan pengisian data dan informasi yang memungkinkan untuk dapat diakses publik;
- 6) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja unit kerja sebagai bahan evaluasi proses pencapaian kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan dan kinerja;
- 7) Memastikan seluruh laporan kinerja unit kerja telah melalui proses reviu Biro Pengawasan Internal sebelum dipublikasi untuk memastikan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan kinerja tersebut;
- 8) Memastikan *Quality Assurance* atas pelaksanaan evaluasi internal sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas evaluasi internal atas implementasi SAKIP unit kerja. Hal ini dilakukan agar evaluasi internal mampu memberikan penilaian dan rekomendasi yang berkualitas sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- 9) Memastikan pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi evaluasi internal unit kerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.